

EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Yuni Pratikno, Sri Wahyuningsih, Rahmad Hidayat, Yolanda Intan Irawanti
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif dan/bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Dalam hal ini dipaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Kabupaten Bogor, sedangkan secara kuantitatif dihitung kekuatan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten Bogor.

Hasil menunjukkan pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor selama tahun 2012 - 2017 cenderung semakin menurun, dari hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2012 sampai 2017 rata-rata adalah sebesar 97,53%, artinya tingkat efisiensi masih kurang karena hasilnya kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggarannya.

Pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor selama tahun 2012 - 2017 cenderung stabil, dari hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Bogor tahun 2012 sampai 2017 rata-rata sebesar 94,03% per tahun. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bogor adalah sudah efektif, karena dari hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90%.

Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan seta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber

penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah. (Mahmudi: 2009:9)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor selalu di bawah pertumbuhan Provinsi Jawa Barat. Hal ini bisa dimengerti karena perekonomian Jawa Barat didominasi sektor industri sedangkan perekonomian Kabupaten Bogor didominasi sektor pertanian, dimana pada umumnya pertumbuhan sektor industri akan lebih cepat dibandingkan sektor pertanian.

Berikut ini perkembangan keadaan keuangan di Kabupaten Bogor periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017:

Tabel 1
Kondisi Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2012-2017

TAHUN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	TARGET BELANJA	REALISASI BELANJA	CLR
1	2	3	4	5	6
2012	357.581.985.995,70	367.536.151.254,82	341.844.281.557,25	330.736.863.708,80	89,99
2013	526.647.929.985,77	547.960.209.812,88	510.408.587.916,39	483.383.504.959,50	88,22
2014	600.452.195.875,48	610.883.125.455,98	678.542.770.685,53	612.006.122.761,76	100,18
2015	709.669.692.359,29	717.094.445.315,01	800.024.089.085,42	760.344.101.207,44	106,03
2016	786.528.918.302,08	797.425.759.150,83	841.364.328.682,21	803.665.493.882,83	100,78
2017	892.481.019.781,00	887.001.554.928,49	964.095.292.331,00	886.619.182.158,09	99,96

Sumber: DPPKA Kabupaten Bogor, Laporan Realisasi APBD 2012-2017 (data diolah)

Dari data pada Tabel 1 di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan dan realisasi belanja secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian dan Unit Analisis

Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif dan/bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Dalam hal ini dipaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Kabupaten Bogor, sedangkan secara kuantitatif dihitung kekuatan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten Bogor.

Unit Analisis pada penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

2, Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama enam tahun dari tahun 2015 sampai 2017, yang diperoleh dari Badan

Pusat Statistik Kabupaten Bogor dan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bogor berupa laporan tahunan yang bersangkutan. data yang dipergunakandalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bantuan, Sumbangan Subsidi, Dana Alokasi Umum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain-lain.

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dan berbagai institusi melalui data seri waktu (*time series*) pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

1. Laporan Realisasi APBD dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bogor
2. Buku Bogor dalam angka dari Kantor Statistik Kabupaten Bogor
3. Buku RPJMD dari Kantor Bappeda Kabupaten Bogor

3. Konsep dan Definisi Operasional Variabel

Dalam memahami pengertian dan penafsiran konsep yang digunakan dalam analisis dan pembahasan, maka beberapa batasan dan pengertian dasar/konsep operasional dari variabel dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD adalah total penerimaan daerah berupa realisasidari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dan penerimaan lain-lain yang dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun.
2. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalm periode tahun anggaran yang bersangkutan , yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
3. Pendapatan Asli daerah (PAD)
PAD adalah realisasi penerimaan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain yang dinyatakan dalam satua rupiah per tahun.
4. Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam satuan rupiah per tahun
5. Total Penerimaan Daerah
Total Penerimaan Daerah adalah data anggaran dan realisasi APBD , anggaran dan realisasi PAD, dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu , pendapatan asli daerah , bagi hasil pajak dan bukan pajak, dalam satuan rupiah per tahun.
6. Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturn perundang-undangan (Undang-undang omor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).
7. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran

pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Undang-undang Noor 33 Tahun 2004 tentang peimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Efisiensi

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuain faktor makro ekonomi. Namun demikian pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya, dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Mahmudi (2017) efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi belanja untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis efisiensi dalam pengelolaan keuangan adalah dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatm}} \times 100\%$$

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupatn
Bogor Tahun 2012-2017

TAHUN	REALISASI PENDAPATAN	REALISASI BELANJA	EFISIENSI (%)
1	2	3	4
2012	367.536.151.254,82	330.736.863.708,80	89,99
2013	547.960.209.812,88	483.383.504.959,50	88,22
2014	610.883.125.455,98	612.006.122.761,76	100,18

2015	717.094.445.315,01	760.344.101.207,44	106,03
2016	797.425.759.150,83	803.665.493.882,83	100,78
2017	887.001.554.928,49	886.619.182.158,09	99,96
RATA-RATA	654.650.207.653,00	646.125.878.113,07	97,53

Sumber : Laporan target dan Rekapitulasi 2012-2017 (data diolah)

Dari hasil perhitungan seperti yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2012 adalah 89,99%, kemudian pada tahun 2013 menjadi 88,22% , ini berarti cukup efisien, hal ini diakibatkan adanya penghematan pada belanja pemeliharaan dan belanja modal, pada tahun 2014-2017 tingkat efisiensi mencapai 100% lebih, hal ini Di Kabupaten Bogor Tahun 2012-2017

Pada Gambar diatas, terlihat bahwa pola perkembangan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor selama tahun 2012-2017 cenderung semakin menurun dengan tingkat efisiensi rata-rata per tahun sebesar 97,53% yang berarti kurang efisien karena hasilnya kurang dari 100%.

2. Analisis Efektivitas

Anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah, pemerintah daerah akan dinilai baik kinerjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dapat diketahui secara langsung besarnya anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasinya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis yaitu: 1) selisih disukai (*favourable variance*) yaitu realisasi belanja yang lebih kecil dari anggarannya dan 2) selisih tidak disukai (*unfavorable variance*) yaitu realisasi belanja yang lebih besar dari anggarannya.

Efektivitas lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2001:72), efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. Dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang Direncanakan

Untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 2
Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di
Kabupatn Bogor
Tahun 2012-2017

TAHUN	TARGET BELANJA	REALISASI BELANJA	EFEK TIVITAS (%)
1	2	3	4
2012	341.844.281.557,25	330.736.863.708,80	96,75
2013	510.408.587.916,39	483.383.504.959,50	94,71
2014	678.542.770.685,53	612.006.122.761,76	90,19
2015	800.024.089.085,42	760.344.101.207,44	95,04
2016	841.364.328.682,21	803.665.493.882,83	95,52
2017	964.095.292.331,00	886.619.182.158,09	91,96
RATA-RATA	689.379.891.709,63	646.125.878.113,07	94,03

Sumber : Laporan target dan Realisasi APBD 2012-2017 (data diolah)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bogor pada tahun 2012 sebesar 96,75%, tahun 2016 sebesar 94,71%, kemudian tahun 2014 sebesar 90,19%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 95,04%, pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 95,52% dan pada tahun 2017 turun menjadi 91,96%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor selama 5 tahun cenderung semakin menurun , dari hasil analisis menunjukkan

bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2012 – 2017 rata-rata adalah sebesar 97,53%, artinya tingkat efisiensi masih kurang karena hasilnya kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggarannya.

2. Pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor selama 5 tahun cenderung stabil, dari hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Bogor tahun 2012 – 2017 rata-rata sebesar 94,03% per tahun. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bogor adalah sudah efektif, karena dari hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90%.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Agar belanja daerah Kabupaten Bogor bisa lebih efisien, maka Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif.
2. Agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, “Anggaran Daerah dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia”, JEBI Vol. 16, No. 4, 2016.
- Alfian Lains, “Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru”, PRISMA, No. 4, 1985.
- Booth, Anne., “Pendanaan Pemerintah Pusat Dalam Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah”, PRISMA nomor 1 Januari 1988, hlm. 65-78.
- Davey K.J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerbit UI- Press.
- Departemen Dalam Negeri, 1991, “Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, Litbang Depdagri, Jakarta.
- Devas, Nick, dkk, 1989, “Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, Penerbit UI-Press.
- Gujarati, D. *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Sumarno Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- H. Miyasto, “Reformasi Pajak dan Retribusi Daerah”, *Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik*, Vol. 2 (4) Oktober 2013.

Kaho, 1997, "Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia", cetakan keempat Rajawali Press, Jakarta.

Mardiasmo, 2016, "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah"

Miller, SM dan Russek, FS, "Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level", Public Finance Review, Vol. 25 No. 2, March 1997, 213-237, Sage Publications, Inc.

Mudradjat Kuncoro, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan", PRISMA, nomor 4, 1995, Jakarta.

Musgrave R.A and Musgrave P.B, 1993, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Radianto, "Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi di Maluku", PRISMA nomor 3, 1997.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

....., Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

....., Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

....., Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Dana Perimbangan.

Rita Engleni, "Pentingnya Penyusunan Rencana Penerimaan PAD Jangka Menengah Dalam Menunjang Akuntansi Manajemen Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang", Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2016.

Sadono Sukirno, 1994, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sadono Sukirno, 2014, Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyanto, "Kemandirian dan Otonomi Daerah", Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XII, No. 1 Juni 2015.

Suparmoko, 2016, "Ekonomi Publik : Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah", Penerbit Andi Yogyakarta.

Suparmoko, 1994, Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek, BPFY Yogyakarta.

Susiyati B. Hirawan, 1987, "Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional : Keuangan Daerah di Indonesia", Badan Otonomconomica bekerja sama dengan LPFE-UI Jakarta.